Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan E-ISSN: 2809-8544

# PERAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KANTOR CAMAT ANGGABERI KABUPATEN KONAWE

#### Java Satria Lahadi

Universitas Lakidende **Email:** jayasatria8@gmail.com

#### **Abstrak**

Peran tertib administrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kantor Camat Anggaberi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan. Sejauh ini administrasi pemerintahan telah terselenggara cukup lama, namun hal ini masih kurang tertib serta terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan perannya., maka aparat pemerintah kecamatan perlu mempraktekkan sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam pelaksanaan tertib administrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran tertib administrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan di kantor camat anggaberi berada pada taraf yang kurang baik, hal ini terutama terlihat pada semua variable penelitian, yakni pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan program kegiatan dalam kurun waktu setahun, serta pengelolaan arsip kantor, belum dapat terlaksana sesuai hasil yang diinginkan, hal ini juga disebabkan karena adanya factor-faktor yang mempengaruhi baik itu factor internal yaitu penerapan disiplin pegawai yang masih rendah, kerjasama antar aparat masih sangat rendah yang disebabkan oleh tupoksi masing-masing, serta pelatihan bagi aparat yang harusnya lebih ditingkatkan. Factor eksternal berupa kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta terbatasnya aparatur pelaksana. Kesimpulan dan saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini, adalah seluruh aparat yang mempunyai tenggungjawab terhadap terwujudnya tertib administrasi diharapkan mampu bekerja dengan baik dan professional serta paham terhadap tugas pokok yang diemban, serta didukung dengan sumber daya aparat yang memadai sehingga cita-cita dalam mencapai misi organisasi demi mewujudkan keberhasilan pembangunan dikecamatan anggaberi dapat terwujud kearah yang lebih baik.

Kata kunci: Peran, Tertib Administrasi, Keberhasilan Pembangunan

#### Abstract

Orderly administration role in supporting the success of development in Anggaberi Head Office is one of the efforts to realize the state apparatus that is capable of supporting the smooth and integration of the tasks and functions of state governance and development. So far the administration has been held long enough, but it is still less orderly and there are many shortcomings in performing its role., The sub-district government officials need to practice the system and mechanism of professional work in the implementation of the orderly administration. The results showed that the role of the orderly administration in supporting the success of development at the district office anggaberi are at levels which are less good, it is mainly seen in all study variables, namely the implementation of the information system of population administration, the implementation of the program of activities within a year, as well as records management office, can not be done according to the results desired, it is also due to the factors that influence both internal factors, namely the

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



application of discipline is still low, the cooperation among officials remains very low due to the duties of each, as well as training for officials who should have been much improved. External factors such as the lack of facilities and supporting infrastructure, and the limited executive apparatus. Conclusions and suggestions that can be recommended in this study, is the entire apparatus that has tenggungjawab to the establishment of orderly administration is expected to work well and professionally and understand the basic tasks carried and supported by resource personnel sufficient to allow aspiration to achieve its mission organization in order to realize the success of development in the district anggaberi can materialize into a better direction.

Keywords: Order Administration, Development Success

#### **PENDAHULUAN**

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Kecamatan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang mempunyai kewenangan yang cukup, sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana peran tertib administrasi aparatur pemerintahan kecamatan dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Selain sebagai pelaksana dan perencana program pembangunan, maka para aparatur pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan.

Pada saat ini proses pelaksanaan tertib administrasi terkesan masih kurang terlaksana dengan baik, diantaranya pelayanan juga terkadang masih sulit untuk dapat diakses langsung oleh masyarakat dan prosedur yang terkadang berbelit-belit dan sering menyulitkan masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kecamatan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kecamtan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kecamatan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri. Disini harus dipahami bahwa kecamatan merupakan suatu kesatuan

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya menuju kesejahteraan.

Upaya untuk memperkuat dan memberdayakan pemerintah ditingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan keberhasilan. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang sertra dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam pelaksanaan tertib administrasi.

Pemerintahan kecamatan harus benar-benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan wilayahnya untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pemerintah kecamatan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya. Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan sejahtera.

Keberhasilan Pembangunan di tingkat kecamatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang ditujukan pada pemerataan hasil pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah Kecamatan memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan. Tugas memperbaiki system adminitrasi kantor Kecamatan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah kelurahan dituntut untuk selalu melakukan perubahan positif, apakah dari segi kepemimpinan, sumber daya manusia, kinerja birokrasi yang berorientasi pada peran masing-masing aparat kelurahan dalam pelaksanaan tertib administrasi sehingga keberhasilan pembangunan pemerintah kecamatan benar-benar makin mengarah pada praktek *good governance*.

Kecamatan merupakan organisasi langsung di bawah pemerintah daerah dan organisasi pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, maka kecamatan menjadi sumber utama dan pertama berbagai data dan keterangan yang diperlukan oleh pemerintah di atasnya dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah maupun nasional.

Bedasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Peran Tertib Administrasi dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Pada Kantor Camat Anggaberi dan 2) Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan Tertib Administrasi terhadap keberhasilan Pembangunan pada Kantor Camat Anggaberi?

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



#### TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

#### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui Peran Tertib Administrasi dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Pada Kantor Camat Anggaberi.
- 2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Tertib Administrasi pada Kantor Camat Anggaberi

# **Manfaat Penelitian**

- 1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi, kontribusi pemikiran bagi aparat pemerintah Kecamatan Anggaberi dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tertib administrasi serta untuk mengembangan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan Peran Tertib Administrasi dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Pada Kantor Camat Anggaberi.
- 2. Secara teoritis dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan penulis mengenai gambaran yang ada dalam pemerintah kecamatan sehingga dapat menghadapi segala macam persoalan yang ada dalam lingkup pemerintah kecamatan.

#### TINJAUAN PUSTAKA

# **Konsep Peran**

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Di dalam peran mencakup dua aspek :

- 1) Kita harus untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran.
- 2) Kita harus memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Peran memungkinkan kebebasan tertentu bagi kita tetapi bagi sebagian besar diantara kita kebebasan tersebut bersifat terbatas. Misalkan, apabila seorang perempuan memutuskan bahwa ia senang memakai daster atau seorang laki-laki memakai sarung. Dalam situasi ini mereka berpegang teguh pada keputusan. Namun bila sesuatu peristiwa formal tiba, menghendaki mereka untuk kuliah maka mereka akan cenderungmengikuti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diataur oleh niali-nilai social yang diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. (Horton, Paul B., L.Hunt, Chester. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.)

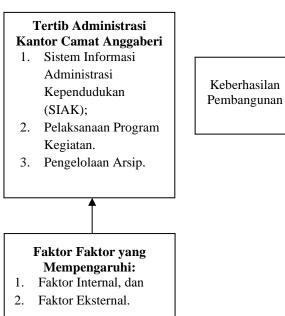
Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

# Konsep Tertib Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Latin yakni *ad* yaitu intensif dan *ministrare* yaitu melayani, membantu, memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan.Pengertian Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (White, 1958).

# Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka yang dipaparkan, maka dalam penelitian ini Secara sederhana dapat digambarkan dalam kerangka fikir adalah sebagai berikut:



# METODE PENELITIAN

#### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Anggaberi Kabupaten Konawe. Dengan pertimbangan bahwa peran penting dari pelaksanaan tertib administrasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan, namun demikian masih terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan administrasi kantor, sehingga dapat menghambat keberhasilan dalam pembangunan.

#### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang bekerja di Kantor Camat Anggaberi yang berjumlah 25 orang, Karena secara keseluruhan jumlah informan relatife banyak, maka untuk mendukung validitas data yang

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



dibutuhkan penulis menentukan secara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan informan.

#### Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

- 1. Data primer adalah data yang langsung dapat diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang akan diteliti yakni aparat pemerintah Kecamatan sebagai responden melalui interview.
- 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature-literatur berupa buku-buku, majalah dan media lainnya atau penelitian-penelitian terdahulu dan Sumber bacaan lainnya yang diaanggap perlu untuk melengkapapi penelitian ini seperti, gambaran umum struktur pemerintahan,data monografi ataupun dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang ada di kantor Camat Anggaberi, serta yang berhubungan dengan penelitian dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

#### b. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada di Kantor Camat, serta tata cara yang berlaku dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1. Study Kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh kajian teoritis melalui buku-buku, literature, dokumen dan laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2. Penelitian Lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung pada lokasi dan obyek penelitian, yang akan dilaksanakan dengan teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung aktivitas kerja yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kecamatan Anggaberi dalam melaksanakan proses tertib administrasi.
  - **b.** Wawancara (*interview*), yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para informan, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian tersebut dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview quide*).
  - c. Kaji Dokumen, yaitu dengan melakukan penelusuran data melaluli literature-literatur, dokumen-dokumen maupun laporan hasil pelaksanaan tanggung Jawab masingmasing aparat yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu fenomena dimana data itu disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan (singarimbun dan effendi,1989). Dalam hal ini analisa data berperan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya. Pada tahap ini semua data terkumpul diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan tekhnik pengolahan data yang digunakan, adapun tekhnik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriftif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan hasil penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penduduk Kecamatan Anggaberi sesuai data terakhir berjumlah 6.761 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.671 KK. Sedangkan komposisi jumlah penduduk lakilaki 3.361 Orang jiwa dan penduduk perempuan 3.405 Orang jiwa.

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Anggaberi relatif masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah penduduk yang menyelesaikan wajib belajar 9 tahun seperti yang dicanangkan pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh rendahnya tingkat pendapatan penduduk dan minimnya sarana pendidikan yang tersedia.

# Peran Tertib Administrasi dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan Pada Kantor Camat Anggaberi.

# 1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Dengan SIAK tersebut diharapkan berbagai jenis pelayanan kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Anggaberi dapat lebih baik serta administrasi kependudukan terutama mutasi penduduk pindah, datang, lahir, mati dapat termonitor dengan akurat. Untuk mensosialisasikan program tersebut, Camat beserta seluruh aparat pegawai pada pertemuan-pertemuan di tingkat Kecamatan menyampaikan program SIAK yakni tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelaksanaan tertib administrasi secara umum kita telah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dikecamatan, baik yang bersumber secara internal maupun yang eksternal, seperti semakin pesatnya kegiatan pembangunan yang hasil-hasilnya telah kita rasakan saat ini. Namun demikian masih dapat ditemukan pula dampak yang dapat menimbulkan masalah yang baru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan kemampuan dibidang perencanaan pembangunan dan pemberian pelayanan yang baik dan berkualitas oleh para aparatur kecamatan anggaberi kepada masyarakat sehingga permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi.

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



# 2. Pelaksanaan Program Kegiatan di Kantor Camat Anggaberi.

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis telah diperoleh program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Anggaberi dalam rangka tertib administrasi demi terwujudnya keberhasilan pembangunan yaitu sebagai berikut :

#### 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan kegiatan antar instansi tingkat Kecamatan Anggaberi, setiap tahun dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan untuk lebih memadukan program/ kegiatan pada setiap instansi yang ada di Kecamatan Anggaberi sehingga dalam pelaksanaannya terjadi keserasian sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Instansi yang terlibat pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Anggaberi yaitu:

- a) Para Lurah se-Kecamatan Anggaberi;
- b) Kepala KUA Kecamatan Anggaberi;
- c) Kepala UPTD Puskesmas Anggaberi;
- d) Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Anggaberi;
- e) Koordinator Statistik Kecamatan;
- f) Penyuluh Pertanian Lapangan.

Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi tingkat kecamatan setiap tahun tergantung dari permasalahan atau program kegiatan yang sifatnya perlu penanganan segera. Masalah yang dibahas pada Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Anggaberi antara lain masalah keamanan dan ketertiban wilayah, pendidikan dan kesehatan warga masyarakat, keagamaan dan sebagainya. Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Anggaberi selama Tahun 2014 sebanyak 8 (delapan) kali. Dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Anggaberi setiap tahun diharapkan keterpaduan dalam melaksanakan program/ kegiatan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat

# 4. Pembinaan Kelurahan

Kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan serta peningkatan tertib administrasi di kelurahan sehingga berbagai program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota berjalan sesuai yang direncanakan. Jumlah pembinaan kelurahan se-Kecamatan Anggaberi selama tahun 2014 sudah dilaksanakan 4 (empat) kali pembinaan. Materi pembinaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Anggaberi antara lain tertib administrasi, disiplin pegawai, system pelayanan serta materi lainnya terkait permasalahan yang terjadi di kecamatan yang disampaikan pada saat dialog.

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

#### 5. Tertib Administrasi Pertanahan

Dalam rangka meningkatkan catur tertib pertanahan yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup, salah satu upaya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan yaitu berupa menginformasikan kepada masyarakat, baik pada saat kunjungan lapangan maupun pada saat acara-acara tertentu, bagaimana pentingnya memperkuat hak-hak rakyat atas tanah tersebut. Jumlah perolehan hak atas tanah di Kecamatan

# 6. Tertib Administrasi Kependudukan.

Seiring dengan perkembangan penduduk yang begitu cepat serta perpindahan penduduk baik yang masuk maupun yang pindah dari dan ke Kecamatan Anggaberi, maka untuk akurasi data diperlukan administrasi penduduk yang tertib. Dalam rangka tertib administrasi penduduk tersebut, Kecamatan Anggaberi beserta perangkat kelurahan dibantu RT/RW mempunyai komitmen untuk bersama-sama mencatat setiap perpindahan penduduk di wilayahnya.

#### 7. Pembinaan RW/ RT

Dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Pembinaan Kemasyarakatan, maka perlu dibentuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di segala bidang, salah satu kuncinya diperlukan RW/RT yang betul-betul mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing Pengurus RW/RT, sehingga dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pelayanan oleh pihak Kelurahan barjalan baik, lancer dan tertib. Pelaksanaan pembinaan RW/RT oleh Kecamatan lebih banyak dilakukan secara non formal, namun dengan teknis anjang sana dan silaturahmi, hal ini semata-mata dilaksanakan untuk lebih menjalin kebersamaan, kekeluargaan dan lebih aspiratif.

# Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tertib Administrasi terhadap keberhasilan pembangunan di Kecamatan Anggaberi.

Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan nonfisik dari suatu masyarakat, sehingga akselerasi (percepatan) pembangunan disetiap negara tidak sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan mempunyai relevansi dengan kondisi tersebut antara lain:

### a. Faktor Internal

#### 1) Penerapan Disiplin

Berdasarkan pengamatan penulis bahwasanya tingkat disiplin pegawai pada kantor camat anggaberi masih rendah, hal ini menunjukkan pula bahwa penegakkan disiplin

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



belum berjalan sesuai apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan keterangan bahwa penerapan sikap disiplin bagi aparat belum berjalan sesuai apa yang diharapkan. Oleh karena itu peran pimpinan (camat) sangat strategis karena secara langsung keberaddaan pimpinan akan mempengaruhi kondisi disiplin aparat. Hal ini dapat dipahami karena peranan pimpinan dalam kaitannya dalam upaya penegakan disiplin, ada beberapa hal diantaranya; pemimppin berperan sebagai contoh, panutan dan teladan bagi bawahannya.

Pemimpin berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan tugas masing-masing bawahan. Dengan demikian, pegawai akan bekerja sungguh-sungguh apabila pimpinan senantiasa melakukan pengawasan yakni dengan pengawasan yang efektif, kontinyu dan terencana, maka kemungkinan terjadinya terjadinya pelanggaran disiplin dapat dicegah.

Pemimpin berperan dalam menentukan keputusan yang tegas, adil dan konsekuen dalam menindak kurangdisiplinnya aparat ataupun tidak setia pada aturan yang ada. Peranan tersebut dapat juga berupa bentuk kegiatan yakni pemberian bimbingan atau arahan dan petunjuk secara terus menerus pada segenap bawahannya disertai sikap konsisten terhadap aturan yang berlaku.

# 2) Kerjasama Antar-aparat

Kerjasama antar aparat, baik antara pimpinan dan bawahan, antar sesama pegawai dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam mencapai tertib administrasi tersebut. Begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparat hendaknya saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diemban. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Seksi Kepegawaian: "kerjasama antar pegawai merupakan kunci utama. Karena antara pegawai satu dengan pegawai lainnya itu saling membutuhkan. Contohnya pegawai yang bekerja disuatu bidang tertentu tidak mungkin lagi mengerjakan yang bukan menjadi kewenangannya Karena setiap item pekerjaan sudah dibagikan tugasnya masing-masing.

Di Kecamatan Anggaberi menurut pengamatan penulis memang menerapkan sistem pembagian wewenang bukan pemisahan wewenang. Maksudnya adalah aparat yang satu dengan yang lainnya bekerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas, tanpa tergantung pada bidang kerja masing-masing atau contoh kasus misalnya, bila seorang aparat berhalangan hadir, maka aparat yang lain bersedia menggantikannya sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tertunda. Sistem ini memang cocok digunakan, karena mengingat aparat yang bertugas dalam upaya pelaksanan tertib administrasi berdasarkan fakta di lapangan belum secara menyeluruh paham dengan beban tugas.

### 3) Pelatihan-pelatihan bagi aparat

Pelatihan bagi aparatur diperlukan dalam menunjang dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan aparat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, oleh sebab itu hal ini adalah salah satu faktor penunjang bagi terciptanya tertib administrasi

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan

yang lebih baik lagi serta demi memperluas pengetahuan para aparat untuk menjawab tantangan yang semakin beragam. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan bahwa: "Untuk melaksanakan tugas secara efektif keterampilan dari pegawai itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu kami melakukan pelatihan-pelatihan bagi setiap pegawai kami agar kedepan mereka tidak lagi ada masalah dalam pelaksaanaan tertib administrasi karena mereka telah terlatih.

#### b. Faktor Eksternal

# 1. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam rangka upaya mewujudkan tertib administrasi di Kantor Camat Anggaberi. Kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana tersebut sangat kurang. Hal inilah yang akan berdampak buruk terhadap kinerja aparat dalam melaksanakan tugastugasnya. Di Kantor Camat Anggaberi berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana dan prasarana dikantor tersebut memang masih kurang memadai.

# 2. Terbatasnya Aparatur Pelaksana

Pegawai di kantor camat anggaberi yakni sebagai pelaksana tugas administrasi itu sendiri secara kuantitas masih kurang profesional, hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Camat Anggaberi menyatakan bahwa: "Jumlah aparat yang tersedia tidak sesuai dengan beban kerja yang ada. Di kantor ini pegawai yang ada itu masih sangat kurang, padahal dalam mewujudkan tertib administrasi memang membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Mengenai masalah ini sudah saya bicarakan dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati supaya bisa menambahkan pegawai, agar pekerjaan yang kami kerjakan bisa selesai tepat waktu, dengan begitu apa yang menjadi tujuan menciptakan tertib administrasi dalam keberhasilan pembangunan bias tercapai.

Dengan demikian diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kantor camat anggaberi bias terlaksana. Keadaan pegawai negeri sipil maupun staf honorer yang bekerja harus merangkap setiap kegiatan yang ditinggalkan oleh pegawai lain ketika berhalangan hadir, ditambah lagi dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai masih sangat terbatas, hal ini perlu mendapat titik perhatian dari pemerintah daerah.

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran tertib administrasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



- 1) Tentang pelaksanaan Sisitem informasi administrasi kependudukan di kantor camat anggaberi dalam proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan mestinya harus diwujudkan melalui fungsifungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Maka kombinasi tersebut dapat menciptakan Sitem informasi administrasi kependudukan yang seharusnya untuk mencapai tujuan yang yang telah ditetapkan.
- 2) Program kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor camat anggaberi merupakan salah satu upaya tertib administrasi dalam hal perwujudan pembangunan sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat terwujud maka perlu dukungan baik dalam hal ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana maupun dukungan anggaran yang memadai.
- 3) Pengelolaan arsip yang dilaksanakan oleh kantor camat anggaberi, perlu dikelola di dalam suatu sistem kearsipan yang baik dan benar. Mengingat bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selalu berkembang selaras dengan tuntuan jaman dan keadaan, maka dengan sistem kearsipan yang sesuai kebutuhan, sederhana dalam penerapan, dan mudah dilaksanakan diharapkan arsip yang masih memiliki nilai guna arsip bagi organisasi dapat digunakan secara optimal, ditemukan dengan cepat dan tepat jika dibutuhkan.

#### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan tertib administrasi dalam menunjang keberhasilan pembangunan yaitu:

Pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) lebih dulu harus disosialisasikan, agar dapat memudahkan kinerja aparat dalam bekerja sehingga permasalahan yang kompleks dan rumit dapat diatasi.

Program kegiatan yang telah direncanakan dari awal harus disesuakan dengan kemampuan baik dalam hal anggaran, sarana dan prasarana maupun kemampuan sumber daya aparat yang ada di kantor camat anggaberi.

Pengelolaan arsip yang hendak dilakukan oleh aparat kantor camat anggaberi, hendaknya mengacu pada standar yang telah ada dan benar-benar dilaksanakan, sehingga dapat memudahkan mendapatkan data-data yang dibutuhkan dimasa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bina Aksara.

Amsyah, Zulkifli, Drs., MLS. 1996. Manajemen Kearsipan. Jakarta : PT. Gramedia PustakaUtama.

Damanhuri, Didin S. 2010. Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang. Bogor: PT. Penerbit IPB Press

Basri, Faisal H. 1999. Otonomi Daerah Untuk Mengokohkan Indonesia Sebagai Negara Bangsa. *Jurnal Otonomi*. Volume 1. Oktober 1999.

Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan E-ISSN: 2809-8544

- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Handayaningrat, Soewarno, Drs.1996. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Kertapradja, E. Koswara, *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi pada Forum Democratic Reform Support Program (DRSP), 5 November 2007;
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA, Unibraw, Malang.
- Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatatif. Bandung, Rosdakarya
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Ismail. 2009. Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian, Konsep, Model, Teori, dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetomo. 2008. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P.1984. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sondang P Siagian, M.P.A., Ph.D. 1990. Sistem Informasi untuk Pengambilan keputusan. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- \_\_\_\_\_, 1994. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sedarmayanti, Prof. Dr. Hj., M.Pd., APU. 2008. Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soegijoko dan Kusbiantoro.1997. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Grasindo. Soekartawi. 1990. Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Rajawali.
- Soetomo.2006. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Saleh, Azis. 2000. Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa. Makalah. Disintegrasi Masalah disampaikan pada Seminar Bangsa: dan Solusi Pengelolaan Konflik Sosial Sebagai Dinamika Masyarakat dan Upaya Antisipasi Kemungkinan Disintegrasi Bangsa. Padang.
- Tjokroamidjodjo, Bintoro. 1980, Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Widjaja, A.W. 1993. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Jaya Satria Lahadi

DOI: https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.13



Zuhro, Siti. 1999. Masa Depan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perjuangan Panjang Menegakkan Otonomisasi. Jurnal Otonomi. Volume 1. Oktober 1999.

# **Dokumen-Dokumen:**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.